

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN DITINJAU DARI  
TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN  
(Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Marchahsufi Intan Dzulhijjy  
175020101111010**



**JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA MALANG  
2021**

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN DITINJAU DARI  
TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN  
(Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Marchahsufi Intan Dzulhijjy**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: marchaintan123@gmail.com

**ABSTRAK**

Kebijakan pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat baik, sehingga berhasil memposisikan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia. Namun, masih adanya tantangan lain terkait kemiskinan yang masih relatif tinggi dibanding provinsi IPM dibawah DIY. Sebagai sebuah provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta juga perlu melaksanakan rencana prioritas pemerintah pusat, salah satunya adalah peningkatan pendidikan dan kesehatan yang merupakan salah satu bidang sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengeluaran publik sebagai (fungsi Pendidikan dan kesehatan) mempengaruhi realisasi Indeks Pembangunan Manusia dan terhadap tingkat kemiskinan. Data yang digunakan adalah data panel selama periode 2014-2019 berjumlah 30 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan juga berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk belanja Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Namun, berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Melalui Uji Sobel diperoleh hasil bahwa IPM merupakan variabel mediasi Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian terdahulu dan sesuai dengan analisis deskriptif yang dilakukan peneliti melalui data yang diperoleh melalui instansi pemerintahan terkait.

Kata Kunci: IPM, Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan, Kemiskinan

**ABSTRACT**

*The human development policy in the Special Region of Yogyakarta is very good, so that it has succeeded in positioning the province with the highest Human Development Index in Indonesia. However, there are still other challenges related to poverty which is still relatively high compared to the HDI of provinces under DIY. As a province, Yogyakarta Special Region also needs to implement the central government's priority plans, one of which is improving education and health, which is one of the areas of human resources and poverty reduction. This study aims to examine how public spending as (education and health functions) affects the realization of the Human Development Index and on the level of poverty. The data used is panel data during the 2014-2019 period, amounting to 30 samples. The results showed that the government expenditure variables in the education and health sectors had a significant direct effect on the Human Development Index. The Human Development Index also has a significant negative effect on poverty. Meanwhile, education and health spending have a direct and insignificant effect on poverty. However, it has a significant negative effect on poverty through the Human Development Index. Through the Sobel Test, the results show that HDI is a mediating variable for Education and Health Expenditures in Poverty Alleviation. The results of this study are also supported by previous research and are in accordance with the descriptive analysis conducted by researchers through data obtained through related government agencies.*

**Keywords:** HDI, government spending in education, government spending on health, poverty

---

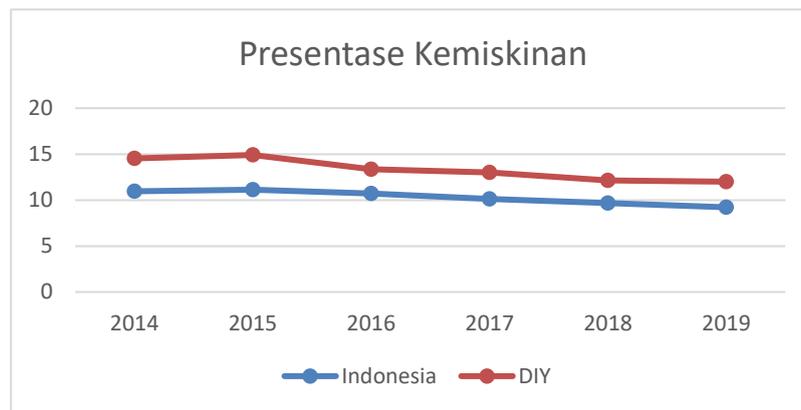
**A. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah diartikan sebagai pengaturan hak dan kewajiban daerah daerahnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerahnya sendiri. Sedangkan menurut prinsip money follow function, penerimaan dan pengeluaran fiskal yang berkeadilan dari pemerintah pusat dan daerah sendiri merupakan sistem distribusi fiskal yang adil dan proporsional. Dengan tambahan kewenangan pemerintah pusat dan dukungan dana melalui transfer dari pemerintah pusat diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat daerah, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu sendiri diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia. IPM adalah indeks yang mengukur kesejahteraan masyarakat dan memiliki tiga elemen. Dengan adanya IPM maka arah pembangunan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memandang pembangunan manusia sebagai elemen dasar pembangunan berkelanjutan (UNDP, 1990). Peningkatan IPM di Indonesia didorong oleh kebijakan fiskal, yang menyediakan layanan melalui mekanisme anggaran, yaitu APBN di tingkat nasional dan APBD di tingkat daerah. Peningkatan pelayanan ini salah satu prioritasnya adalah pada bidang Pendidikan dan

Kesehatan yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di suatu daerah melalui desentralisasi sendiri dapat dalam kaitannya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya, yang menjadi unsur penting penanggulangan kemiskinan.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di pulau Jawa masih menempati urutan pertama sebagai provinsi termiskin, dengan angka kemiskinan DIY kemiskinan di DIY selalu di atas kemiskinan nasional pada tahun 2014 hingga 2019, per September 2019 ini masih di angka 11,44 persen, melebihi rata-rata Nasional pada tahun 2019 sebesar 9,22 persen, namun indeks pembangunan manusia menunjukkan hasil yang sangat baik bahkan sebagai provinsi kedua dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

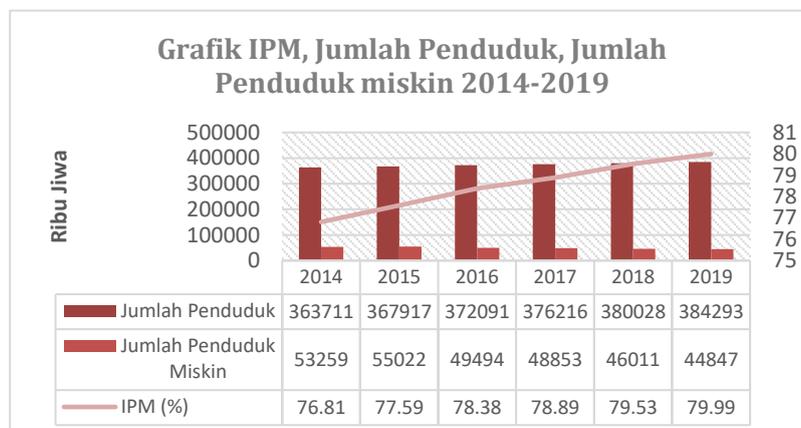
**Gambar 1. 1: Perbandingan presentase kemiskinan Provinsi DIY dengan Indonesia 2014 hingga 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistika, RI (2020), grafik diolah sendiri

Data dari Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan terdapat 448.470 keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Populasi penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Untuk komposisi penduduk sendiri, penduduk DIY dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami peningkatan. Dengan, penduduk paling banyak berada di Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk terakhir di tahun 2019 sebesar 1219640 juta orang. Hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin, dengan data terakhir pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 448.470 juta jiwa. Namun, meskipun begitu peningkatan ini diimbangi dengan kenaikan IPM yang tercatat setiap tahunnya meningkat. Penjelasan ini digambarkan melalui grafik dibawah ini

**Gambar 1. 2: Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 hingga 2019**



Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

Provinsi dengan indeks pembangunan manusia tertinggi seharusnya bisa meminimalkan kemiskinan. Sebagai sebuah provinsi, Yogyakarta juga perlu melaksanakan rencana prioritas pemerintah pusat tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah terhadap IPM dan Kemiskinan ditinjau dari sektor Kesehatan dan Pendidikan. Sebelumnya, penelitian sejenis telah banyak dilakukan terkait menggunakan pentingnya pembangunan manusia menjadi salah satu cara untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat melalui pengalokasian dana pemerintah pada upaya pengentasan kemiskinan. Studi – studi tadi dilakukan Adi Widodo,dkk (2011), Putry andyni,dkk (2018), Brata (2005), Muliza (2017), Hatta (2018), Merang Kahang,dkk (2016). Studi – studi mereka menaruh pandangan baru buat penelitian ini terutama penelitian yang dilakukan Brata (2005) & Yani Mulyaningsih (2008). Brata (2005) mengungkapkan bahwa pembangunan insan yg diproxi menurut IPM(Human Development Index) memuat 3 dimensi krusial pada pembangunan, yaitu dimensi yang terkait menggunakan :

- (a) aspek pemenuhan kebutuhan akan hayati panjang umur (longevity) & hayati sehat (healthy life)
- (b) upaya buat menerima pengetahuan (the knowledge) &
- (c) akses asal daya yg bisa memenuhi standar hayati.

Ketiga dimensi ini secara langsung juga tidak langsung terkait menggunakan taraf kemiskinan. Pembeda dari penelitian sebelumnya dan yang menarik dari penelitian yang diusulkan ini adalah menganalisis peran Indeks Pembangunan Manusia dalam hubungan antara pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan dengan tingkat kemiskinan. Studi ini menguji apakah indeks pembangunan manusia adalah variabel dalam hubungan antara pengeluaran publik dan kemiskinan, Melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel mediasi. Selain itu penelitian ini juga meninjau pendidikan dan kesehatan dari segi alokasi belanja daerah dan menganalisisnya secara deskriptif.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki hak dasarnya untuk menjalani kehidupan dan perkembangan yang bermartabat. HAM tersebut meliputi: pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, kebersihan, air, tanah, sumber daya alam dan lingkungan, rasa aman dalam menghadapi perlakuan atau kekerasan, dan partisipasi sosial dalam hak sosial. Status masyarakat miskin dapat ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan pendapatan dengan standar hidup. Mudrajad Kuncoro (2000) berpendapat bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai taraf hidup minimal. Kemiskinan juga diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat menikmati berbagai pilihan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat menjaga kesehatan, taraf hidup, kebebasan, harga diri, dan rasa hormat seperti orang lain.

### **Indikator Kemiskinan**

Menurut standar pengukuran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurksa dalam Kuncoro (1997) tahun 1953 sangat sederhana, biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian:

#### **1. Kemiskinan absolut**

Ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk jatuh ke dalam kemiskinan, dia akan jatuh ke dalam kemiskinan absolut. Status kemiskinan tersebut ditentukan oleh kebutuhan dasar hidup.

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kondisi kehidupannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka mereka tergolong miskin. Berdasarkan konsep ini, ketika taraf hidup masyarakat berubah maka konsep kemiskinan akan berubah atau selalu ada.

#### **3. Kemiskinan budaya.**

Sikap seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau meningkatkan taraf hidupnya meskipun ada pihak lain yang berusaha membantu. Dengan kata lain, seseorang atau sekelompok orang tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya karena kemiskinannya/Kemalasannya, maka Orang-orang ini adalah kelompok yang miskin secara budaya, sangat malas dan tidak mau memperbaiki. Salah satu indikator tersebut tergolong buruk. Indikator ini Ini dapat diukur dengan mendefinisikan garis kemiskinan.

### Teori Human Capital

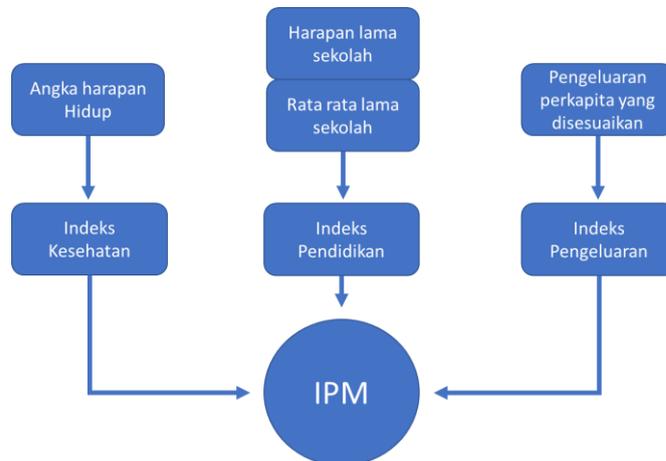
Human capital terdiri dari dua kata dasar yaitu human capital dan capital. Modal didefinisikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tetapi tidak dikonsumsi dalam proses produksi. Menurut pengertian modal, modal manusia adalah salah satu bentuk modal yang mirip dengan mesin dan teknologi. Masyarakat juga dapat berperan atau memikul tanggung jawab di semua bidang kegiatan ekonomi (seperti produksi, konsumsi, dan transaksi). Dengan berkembangnya teori ini maka konsep human capital dapat didefinisikan dengan tiga cara. Konsep pertama adalah modal manusia sebagai pribadi. Ini menunjukkan bahwa modal manusia, seperti halnya pengetahuan dan keterampilan, merupakan keterampilan yang sangat diperlukan. Konsep kedua adalah bahwa modal manusia adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama berbagai kegiatan pendidikan (seperti sekolah, kursus, dan pelatihan). Konsep terakhir menganggap bahwa modal manusia adalah investasi dimana orang untuk menaikkan produktivitas

### Konsep pembangunan dalam Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan pada awalnya hanya dilihat melalui prespektif ekonomi, namun dengan terobosan UNDP pembangunan dilihat dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Indikator yang mengukur kinerja sosial dan ekonomi suatu negara secara keseluruhan berdasarkan tiga aspek utama: kesehatan manusia, tingkat pendidikan, daya beli ekonomi biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2019). Indeks Angka Harapan Hidup merupakan indeks yang memuat informasi angka harapan hidup yang menggambarkan rata-rata angka harapan hidup dan gaya hidup sehat. Indeks pendidikan diperoleh menurut rata-rata waktu belajar dan lama studi.

Gambar 1.3

Bagan pembentuk IPM



Sumber: BPS,Indonesia (2020) grafik diolah sendiri

Peningkatan indeks pembangunan manusia juga harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang salah satunya akan berdampak pada belanja pemerintah. Fokus investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan dan perawatan kesehatan.

### Teori Pengeluaran Pemerintah

Rostow dan Musgrave juga memperdebatkan evolusi belanja publik dalam konteks teori model pembangunan. Ini menghubungkan perkembangan pengeluaran publik dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi, yang membedakan tahap awal, tahap perantara, dan tahap lanjutan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, investasi publik menyumbang sebagian besar dari total investasi karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Pada tahap intermediasi pembangunan ekonomi, investasi publik masih diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga mampu tumbuh. Namun, pada tahap ini, peran investasi swasta juga semakin meningkat. Di tahap intermediasi, peran pemerintah masih tetap penting, oleh karena itu peran swasta semakin berkembang yang banyak di antaranya menimbulkan kekacauan pasar dan memaksa pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang lebih banyak dan lebih baik.

## **Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 11 (5) dan Putusan Nomor 35 Mahkamah Konstitusi / PUU-XI / 2013, mengatur bahwa belanja pemerintah pusat dapat dikategorikan menurut fungsi dan organisasinya. Klasifikasi berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11 fungsi yang masing-masing menyangkut berbagai aspek pelayanan publik dan promosi kepentingan umum.

Menurut peruntukannya, belanja publik dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Belanja rutin, yaitu anggaran yang didedikasikan untuk menyelesaikan tugas departemen nasional dan melaksanakan pembangunan. Biaya tersebut meliputi pembayaran akhir, saldo persediaan, berbagai jenis subsidi (subsidi daerah dan harga komoditas bersubsidi), biaya dan bunga utang pemerintah, serta biaya lainnya.
- 2) Biaya pengembangan adalah biaya yang terkait dengan biaya proses perubahan, yaitu perkembangan dan peningkatan ke arah yang ingin dicapai. Pengeluaran pembangunan mencakup peningkatan modal publik untuk pembangunan substantif dan non-substansial.

## **Hubungan Antara Pengeluaran Publik dengan IPM dan Kemiskinan**

Berdasarkan penelitian Nurska, Jingga (2000) dan Mudrajad Kuncoro (2003), terlihat jelas bahwa daerah atau negara yang sangat miskin berada dalam lingkaran setan kemiskinan. Hal ini dikarenakan sekelompok orang yang miskin akan menemukan kesusahan dalam mencapai aksesibilitas (Novianto Dwi Wibowo 2003). Aksesibilitas dalam hal ini merupakan kemampuan masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasar dalam hidupnya. Dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga pondasi utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. (Mahmudi 2007)

- Rendahnya tingkat kesehatan
- Rendahnya pendapatan
- Rendahnya tingkat pendidikan

Akses masyarakat yang terbatas dalam menjangkau pelayanan kesehatan membuat masyarakat miskin akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Tingkat produktivitas yang rendah akan memunculkan pendapatan yang rendah, dan pendapatan yang rendah menciptakan kemiskinan. Kemiskinan ini menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dilakukan di lima kabupaten dan kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan. Data tersebut berdasarkan fungsi pendidikan dan kesehatan dan dinyatakan dalam belanja daerah ribuan rupiah per tahun. Indeks kemiskinan dan pembangunan manusia pada khususnya indeks area. Yogyakarta dari 2014 hingga 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Keuangan (DJPB) Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) Bappeda Daerah Istimewa dan / atau pejabat instansi penanggung jawab. , Buku, literatur, internet, catatan atau sumber terkait lainnya. Dalam studi ini, Microsoft Excel dan SPSS digunakan untuk mengolah data untuk semua analisis. Penelitian ini menggunakan analisis jalur. Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengetahui dampak belanja publik untuk pendidikan (X1) dan kesehatan (X2) terhadap IPM (Y1) dan kemiskinan (Y2). Ahmad dan Kuncoro (2012: 2) menjelaskan bahwa “model path analysis” digunakan untuk menganalisis struktur hubungan antar variabel guna mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel independen (eksogen) dan Variabel terikat (endogen).

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung dari banyak variabel independen (eksogen). Beberapa variabel diatur dalam penelitian ini. Sebelum melakukan regresi akan dilakukan Log data untuk menyamakan satuan data terkait, hal ini dilakukan karena data pengeluaran pemerintah daerah memiliki satuan juta rupiah dan indeks kemiskinan dan indeks pembangunan manusia memiliki satuan persen. Setelahnya akan dilakukan regresi serta uji Sobel dan Uji hipotesis.

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis jalur (path analysis) adalah sebagai berikut :

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori pada diagram jalur
2. Berdasarkan model relasional ditemukan persamaan struktural yaitu uji regresi terdapat dua yaitu:

Blok I :  $Y1 = \rho_{y1x}X + e_1$   
 Blok II :  $Y2 = \rho_{y2x}X + \rho_{y2y1}Y1 + e_2$

Keterangan :

- P : Koefisien Jalur
- X,Z,Y : Variabel Teridentifikasi
- $e_1, e_2$  : Variabel Tak Teridentifikasi (Residual atau Prediction Error)
- X : Variabel bebas yaitu Belanja Pendidikan dan Kesehatan
- Y1 : Variabel Intervening yaitu Indeks Pembangunan Manusia
- Y2 : Variabel Terikat yaitu Kemiskinan
- $\rho_{y1x}$  : Pengaruh langsung X terhadap Y1
- $\rho_{y2x}$  : Pengaruh langsung X terhadap Y2
- $\rho_{y2y1}$  : Pengaruh langsung Y1 terhadap Y2.

3. Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis dan dilakukan uji sobel untuk menuji apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu menjadi mediator. Sobel test menggunakan rumus seperti berikut ini :

$$t = \frac{ab}{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}$$

Keterangan :

a = Koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi

b = Koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen

$SE_a$  = *Standard error of estimation* dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

$SE_b$  = *Standard error of estimation* dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tinjauan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dan letaknya berada di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian Selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Provinsi Yogyakarta secara geografis terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Bentuk peta Provinsi Yogyakarta berbentuk segitiga, dengan puncak Gunung Merapi di sebelah utara, dengan ketinggian 2.911 m. Kepadatan penduduk Yogyakarta tahun 2019 adalah 1.206 jiwa per kilometer persegi. Wilayah terpadat adalah Kota Yogyakarta, dengan kepadatan penduduk 1.290 jiwa per kilometer persegi. Daerah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan kepadatan penduduk 500 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk di Yogyakarta sebesar 1,18% dari tahun 2014 hingga 2019, Pemerintah Bantul mencatat laju pertumbuhan tertinggi (1,24%), dan laju pertumbuhan terendah (1,06%) di Gunungkidul.

Yogyakarta secara administratif terbagi menjadi empat wilayah dan satu kota: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Kawasan Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan memiliki 78 ruas jalan, 392 desa dan 46 ruas jalan yang terbagi dalam beberapa ruas jalan. Sleman memiliki 17 ruas jalan dan 86 desa, Kota Yogyakarta memiliki 14 ruas jalan dan 45 ruas jalan, dalam pemerintahan Bantul Gunungkidul dan Kulon Progo terdapat 17 ruas jalan dan 75 desa, 18 ruas jalan dan 144 desa. Ada 12 ruas jalan, 87 desa dan 1 Kelurahan di daerah tersebut.

Dari Maret 2014 hingga September 2019, Proporsi pengrajin berpenghasilan rendah turun dari 15,00% menjadi 11,44%. Pada saat yang sama, proporsi penduduk miskin yang melakukan pekerjaan rumah secara bertahap menurun. Pada Maret 2015, proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sedikit meningkat sebesar 0,36 persen dibandingkan dengan September 2014. Namun pada September 2015, proporsi penduduk miskin di sektor DIY turun signifikan dari 1,75 poin menjadi 13,16%. Meskipun proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan meningkat menjadi 13,34% pada Maret 2016, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus menurun pada enam tahun berikutnya.

### Hasil Analisis Path

1. Persamaan struktur I

(pengaruh Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia)

Berdasarkan hasil regresi didapatkan hasil bahwa:

$$R \text{ Square: } 0,240$$

Berdasarkan hasil analisis dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$Z = P_{y1x} + e_1$$

$$Z = 0,490 + 0,871$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a)  $P$  (Koefisien jalur) = Merupakan koefisien jalur  $X_1$  dan  $X_2$ , yang bermakna IPM ( $Y_1$ ) dapat dijelaskan oleh Belanja Kesehatan ( $X_1$ ) dan Belanja Pendidikan ( $X_2$ ) sebesar 0,490
- b)  $e_1$  (pengaruh error) = Variabel yang tidak teridentifikasi (*error*) dapat dihitung sebagai berikut:

$$P_{e1} = \sqrt{1 - R^2_1}$$

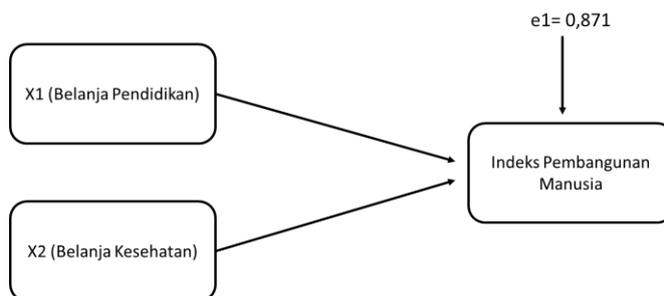
$$= \sqrt{1 - 0,240}$$

$$= \sqrt{0,76}$$

$$= 0,871$$

Pengaruh error pada struktural 1 sebesar 0,871 atau 87,1% maka dapat diartikan bahwa informasi yang terkandung dalam hasil perhiungan hanya mampu menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent sebesar 12,9% sedangkan sisanya sebesar 87,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

**Gambar 4.1: Model Blok 1 Variabel  $X_1$  dan  $X_2$  Terhadap Variabel  $Y_1$**



**Sumber : Olah Data Sekunder Peneliti (2021)**

$$P_{zx} = 0,490$$

$$Sig = 0,016$$

$$Sig = 0,006$$

$$e_1 = 0,871$$

2. Persamaan Struktural II Pengaruh Langsung Belanja Pendidikan ( $X_1$ ), Belanja Kesehatan ( $X_2$ ) dan Indeks Pembangunan Manusia ( $Y_1$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ ).

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.2 dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = P_{y2x} + P_{y1y2} + e_2$$

$$Y = 0,016 + 0,017 - 0,928 + 0,38$$

Persaman regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a.  $P$  (koefisien jalur) = 0,925 merupakan koefisien jalur  $X_1$  dan  $X_2$ , yang bermakna Kemiskinan ( $Y_2$ ) dapat dijelaskan oleh Belanja Kesehatan ( $X_1$ ) dan Belanja Pendidikan ( $X_2$ ) sebesar 0,016 dan 0,017
- b.  $P$  (koefisien jalur) = -0,928 merupakan koefisien jalur  $Z$ , yang bermakna Kemiskinan ( $Y_1$ ) dapat dijelaaskan Indeks Pembangunan Manusia ( $Z$ ) sebesar -0,928
- c.  $e_2$  (pengaruh eror) = variabel yang tidak teridentifikasi (*error*) daapat dihitung sebagai berikut:

$$P_{e2} = \sqrt{1 - R^2_2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,855}$$

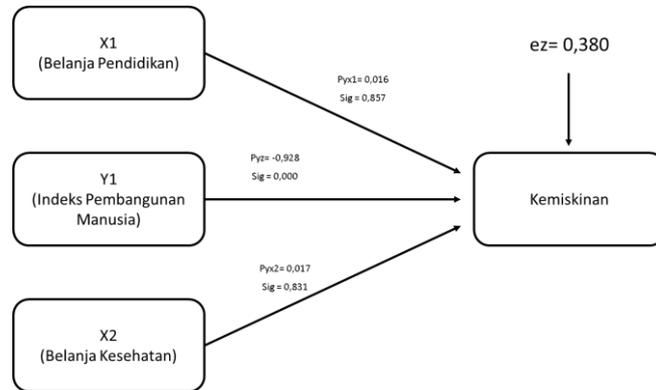
$$= \sqrt{0,145}$$

$$= 0,380$$

Pengaruh error pada regresi kedua sebesar 0,38 atau sebesar 38% maka dapat diartikan bahwa informasi yang terkandung dalam hasil perhitungan hanya mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent sebesar 62% sedangkan sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum terdapat dalam penelitian ini.

**Gambar 4.2**

**Model Blok 1 Variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan Y<sub>1</sub> Terhadap Variabel Y<sub>2</sub>**



**Sumber : Olah Data Sekunder Peneliti (2021)**

3. Pengaruh Tidak Langsung Belanja Pendidikan (X<sub>1</sub>) Belanja Kesehatan (X<sub>2</sub>) Terhadap Kemiskinan (Y<sub>2</sub>) Melalui Indeks Pembangunan Manusia (Y<sub>1</sub>)

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil Pengaruh total variabel X<sub>1</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> melalui variabel Y<sub>1</sub> adalah sebesar -0,43 atau -43%. Arah hubungan negative mengartikan bahwa ketika Belanja Pendidikan (X<sub>1</sub>) naik, maka akan mengakibatkan Kemiskinan (Y<sub>2</sub>) turun.

Pengaruh total variabel X<sub>2</sub> terhadap variabel Y<sub>2</sub> melalui variabel Y<sub>1</sub> sebesar -0,437 atau -43,7%. Arah hubungan negative mengartikan bahwa ketika Belanja Kesehatan (X<sub>2</sub>) naik, maka akan mengakibatkan Kemiskinan (Y<sub>2</sub>) turun.

Total keberagaman data yang didapat dijelaskan oleh model dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - P_{2e1} \cdot P_{2e2}$$

$$= 1 - (0,871)^2 \cdot (0,38)^2$$

$$= 1 - 0,76 \cdot 0,14$$

$$= 1 - 0,1064$$

$$= 0,893$$

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 0,893 atau 89,3%. Dengan kata lain model tersebut dapat menjelaskan informasi berkisar 89,3% dalam data yang dikaji, sedangkan sisanya sebesar 10,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4. Uji Sobel

Belanja Pendidikan berpengaruh secara tidak langsung negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghitung t menggunakan uji sobel.

$$t = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}}$$

$$= \frac{0,110 \times -4,591}{\sqrt{(-4,591^2 \times 0,043^2) + (0,110^2 \times 0,423^2)}}$$

$$= \frac{-505,01}{\sqrt{(38971,892) + (0,000021650409)}}$$

$$= \frac{-505,01}{\sqrt{38971,820}}$$

$$= \frac{-505,01}{197,41}$$

$$= -2,5581$$

Berdasarkan hasil pengujian uji sobel diatas dapat diketahui bahwa nilai t sebesar 2,5581 ( $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ).

Belanja Kesehatan berpengaruh secara tidak langsung negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghitung t menggunakan uji sobel.

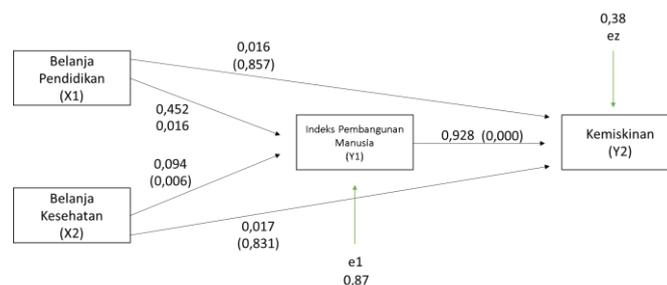
$$\begin{aligned}
 t &= \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}} \\
 &= \frac{0,022 \times -4,591}{\sqrt{(-4,591^2 \times 0,041^2) + (-0,022^2 \times 0,423^2)}} \\
 &= \frac{-101,002}{\sqrt{(210077281 \times 0,001681) + (0,000484 \times 0,178929)}} \\
 &= \frac{-101,002}{\sqrt{(35430,909) + (0,00866011)}} \\
 &= \frac{-101,002}{\sqrt{2384,681}} \\
 &= \frac{-101,002}{48,8332} \\
 &= -2,25260
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian uji sobel diatas dapat diketahui bahwa nilai  $t$  sebesar 2,25260 ( $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ).

Berikut merupakan gambar diagram hubungan kausal empiris antara variabel penelitian dan kalkulasi pengaruh antara variabel yang biasa dilihat pada gambar 4.3 Sebagai berikut :

Gambar 4.3

Model Blok III Variabel X1, X2, dan Y1 terhadap Y2



(Sumber : Olah Data peneliti, 2021)

### Pengaruh Antar Variabel

#### Pengaruh langsung Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa hubungan antara pengeluaran fungsi pendidikan dengan pertumbuhan IPM di Provinsi Yogyakarta positif dan signifikan dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0,452. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia melalui belanja pendidikan telah berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang sejalan dengan pemahaman Merang Kahang,dkk (2016) yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mampu berpengaruh secara positif terhadap IPM di wilayah Kutai Timur. Hasil yang sama juga didapat oleh Jehuda Jean (2019) yang memperoleh hasil bahwa pengeluaran Pendidikan APBN berpengaruh signifikan positif terhadap IPM Indonesia

Dalam analisis deskriptif terkait pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, Belanja daerah pendidikan DIY dari tahun 2014 hingga 2019 selalu memiliki alokasi dana yang terbesar dari APBD dan pada tahun 2019 pemprov DIY menyepakati sebesar 903,2M atau sebesar 26,5% dari APBD, hal ini naik sebesar 2% dari tahun 2018 yang sebesar 24,34% dan naik 200M dari tahun anggaran 2017.

#### Pengaruh langsung Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa realisasi belanja pemerintah fungsi kesehatan pada Daerah Istimewa Yogyakarta rentang tahun 2014-2019 berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0,094. Dibanding belanja fungsi Pendidikan, pengaruh belanja Kesehatan cukup terbilang kecil. Namun, meskipun begitu untuk hipotesis awal yang menyatakan bahwa belanja Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia diterima.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang berhasil membuktikan bahwa belanja fungsi kesehatan berpengaruh dalam peningkatan IPM. Merang Kahang,dkk (2016) yang

mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mampu berpengaruh secara positif terhadap IPM di wilayah Kutai Timur. Hasil yang sama juga didapat oleh Jehuda Jean (2019) yang memperoleh hasil bahwa pengeluaran kesehatan APBN berpengaruh signifikan positif terhadap IPM Indonesia.

### **Pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia DIY memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap indeks kemiskinan dengan nilai pengaruh langsung sebesar (-0,984) , yang berarti bahwa sehingga hipotesis awal yang menyatakan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh kepada pengentasan kemiskinan dapat diterima. Hal ini didukung data yang diperoleh dari BAPPEDA DIY, bahwa Ketika IPM DIY naik setiap tahunnya diikuti pula dengan penurunan kemiskinan. Hal ini, juga terlihat pada tahun 2014 hingga 2019 bahwa Kota Yogyakarta setiap tahunnya memiliki IPM tertinggi dengan kenaikan sebesar 0,54% dan diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,14%. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo sebagai kabupaten dengan kemiskinan tertinggi 17,39% dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah kedua setelah Kabupaten Gunungkidul sebesar 74,44%.

Hasil penelitian ini sebenarnya sejalan dengan penelitian Made dan Kartika (2019) yang memperoleh hasil bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Bali

### **Pengaruh langsung Belanja Pendidikan terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah fungsi Pendidikan tidak signifikan secara langsung mempengaruhi kemiskinan diperoleh dari hasil sig > 0,05 dan t-test yang mana thitung < ttabel. Hal ini diduga bahwa memang pengeluaran tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Hasil ini didukung oleh data yang diperoleh dari Bappeda (2020) bahwa Ketika belanja Pendidikan kabupaten dan kota DIY pada tahun 2014 hingga 2019 terjadi secara fluktuatif dan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di DIY.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari adi Widodo,dkk (2011) yang memperoleh hasil bahwa belanja publik (Pendidikan dan kesehatan) secara langsung tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan, Namun secara simultan Bersama IPM mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2008.

### **Pengaruh langsung Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan**

Dari hasil penelitian sendiri menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan diperoleh dari hasil sig > 0,05 dan t-test yang mana thitung < ttabel. Hal ini diduga bahwa memang pengeluaran tersebut tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Hasil ini didukung oleh data yang diperoleh dari Bappeda (2020) bahwa Ketika belanja Kesehatan kabupaten dan kota DIY pada tahun 2014 hingga 2019 terjadi secara fluktuatif dan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di DIY.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari adi Widodo,dkk (2011) yang memperoleh hasil bahwa belanja publik (Pendidikan dan kesehatan) secara langsung tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan, Namun secara simultan Bersama IPM mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2008.

### **Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil analisis jalur pada hasil SPSS, dapat diketahui bahwa Belanja Pendidikan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kemiskinan. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan Sobel Test dapat diketahui pula bahwa Belanja Pendidikan mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan thitung > ttabel. Sehingga dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam variabel intervening untuk variabel Belanja Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hatta(2018) yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel kualitas sumber daya manusia mampu mempengaruhi Kemiskinan di wilayah Ajatappareng melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Hasil yang sama juga diperoleh dengan penelitian adi Widodo,dkk (2011) yang memperoleh hasil bahwa belanja publik (Pendidikan dan kesehatan) secara langsung tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan, Namun secara simultan Bersama IPM mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2008.

## **Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil analisis jalur pada hasil SPSS, dapat diketahui bahwa Belanja Kesehatan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kemiskinan. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan Sobel Test dapat diketahui pula bahwa Belanja Pendidikan mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sehingga dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam variabel intervensi untuk variabel Belanja Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hatta(2018) yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel kualitas sumber daya manusia mampu mempengaruhi Kemiskinan di wilayah Ajatappareng melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervensi. Hasil yang sama juga diperoleh dengan penelitian adi Widodo,dkk (2011) yang memperoleh hasil bahwa belanja pblik (Pendidikan dan kesehatan) secara langsung tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan, Namun secara simultan Bersama IPM mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2008.

### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Belanja Pendidikan pemda DIY berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang mana berarti Ketika Belanja Pendidikan meningkat maka, Indeks Pembangunan Manusia DIY ikut meningkat. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa pengalokasian belanja Pendidikan DIY sudah tepat dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat di DIY. Hal itu, juga terbukti dengan data kenaikan realisasi belanja Pendidikan sejalan dengan kenaikan IPM Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 hingga 2019.
2. Belanja Kesehatan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang berarti bahwa Ketika Belanja Kesehatan DIY naik, maka IPM akan naik. Hal ini juga sejalan dengan data kenaikan realisasi belanja Kesehatan diikuti dengan kenaikan IPM di Kabupaten dan Kota DIY pada tahun 2014-2019.
3. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan. Hal ini dapat di artikan bahwa IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik sehingga mampu untuk mempengaruhi kemiskinan secara negatif. Maka, Ketika IPM di Provinsi DIY naik maka Kemiskinan di Provinsi DIY turun. Hal ini juga didukung data bahwa setiap tahun 2014 hingga 2019 ketika terjadi peningkatan IPM maka Kemiskinan Provinsi DIY turun.
4. Belanja Pendidikan secara langsung tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini diduga karena memang, Belanja Pendidikan tidak bisa secara langsung mengentaskan kemiskinan. Penyaluran alokasi belanja pemerintah perlu membutuhkan waktu untuk nantinya kita bisa melihat dampak dari alokasi belanja tersebut.
5. Belanja Kesehatan secara langsung tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini diduga karena memang Belanja Kesehatan tidak bisa secara langsung mengentaskan Kemiskinan. Penyaluran alokasi Belanja pemerintah perlu membutuhkan waktu untuk nantinya kita bisa melihat dampak dari alokasi belanja tersebut.
6. Pengaruh negatif dan signifikan antara Belanja Pendidikan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia, dimana IPM sebagai intervensi. Yang artinya bahwa dimana semakin tinggi Belanja Pendidikan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang nantinya mampu untuk menurunkan Kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mampu memediasi Belanja Pendidikan terhadap Kemiskinan. Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui modal manusia.
7. Pengaruh negatif dan signifikan antara Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia, dimana IPM sebagai intervensi. Yang artinya bahwa dimana semakin tinggi Belanja Kesehatan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang nantinya mampu untuk menurunkan Kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mampu memediasi Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan. Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan akan dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui modal manusia.

## Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa belanja Kesehatan dan Pendidikan dapat mempengaruhi secara langsung IPM. Oleh karena itu, peningkatan IPM dapat dioptimalkan lagi dengan cara peningkatan mutu Pendidikan dan penyediaan sarana pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara peningkatan kurikulum pendidikan yang sesuai era teknologi, agar lulusan SMA dan SMK dapat siap kerja setelah lulus. Selain itu penyediaan sarana Pendidikan seperti computer sekolah yang memadai, Gedung olahraga dan Gedung lainnya yang meningkatkan hobi serta talenta siswa juga perlu ditingkatkan. Dalam segi kebijakan anggaran kesehatan dan penyediaan sarana kesehatan dapat dilakukan dengan cara peningkatan layanan kesehatan khususnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan antara lain layanan kesehatan untuk penyakit berat, penyakit yang membutuhkan tindakan operasi, persalinan baik normal maupun yang memerlukan tindakan lain.
2. Indeks Pembangunan Manusia DIY terbukti tertinggi dan mampu mempengaruhi kemiskinan secara negatif. Belanja Pendidikan dan Kesehatan terbukti juga mampu mempengaruhi kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Untuk itu, penurunan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui modal manusia (Pendidikan dan Kesehatan) dalam bidang belanja pendidikan dapat dioptimalkan dalam peningkatan mutu program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang, dan untuk SMA dapat menambahkan peningkatan ketrampilan (soft skill ) agar dapat lebih siap kerja saat lulus agar dapat memutus rantai kemiskinan, disediakan juga berbagai beasiswa Pendidikan dan akses Pendidikan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, dalam belanja kesehatan perlunya peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan akan pentingnya kesehatan dan diadakanya program pengobatan murah bahkan gratis untuk masyarakat tidak mampu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiny Puty, Sari. 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 2 No.2. Aceh
- Azwar. 2016. Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol 20. No 2. Jakarta
- Adi Widodo,dkk. 2011. Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *BPKP Jawa Tengah*.
- Alan, dkk. 2008. Employee Training Needs and Perceived Value of Training in the Pearl River Delta of China. *Journal of European. Amerika*
- Brata. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. *Lembaga Penelitian Jurnal. Yogyakarta*
- Dinas Sosial DIY. 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2019. *Publikasi Rutin. Yogyakarta*
- Frank & Bernanke. 2007. *Principles of Microeconomics* (3rd ed). New York
- Fiszbein, Ariel, Ravi Kanbur, dan Ruslan Yemtsov.2014. *Social Protection and Poverty Reduction: Global Patterns and Some Targets*. Elsevier: *Journal World Development* Vol.61.
- Gujarati, Damodar N., Dawn C Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometri*, Buku 2 Edisi 5. Terjemahan:Raden Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat
- Hatta. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Pada Wilayah Ajatappareng. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 1 No.3. Sulawesi Selatan
- Hossain, Mohammad Imran. 2014. Impacts of Public Expenditure on Poverty in Bangladesh: An Empirical Analysis. 11th Asian Business Research Confrence. Dhaka, Bangladesh: BIAM Foundation.
- Jehuda Jehan . 2019. Pengaruh Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review* Vol.4, No.2. Yogyakarta
- Jhingan, M.L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Diterjemahkan oleh: D. Guritno, S.H. Depok: Rajagrafindo Persada.